

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA DALAM WILAYAH JAWA TIMUR (TAHUN 2010-2019)

Arif Hartadi

Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
arifhartadi201@gmail.com

Abstract

Tujuan: *This research aimed to find how the effect of Local Revenue and Fiscal Balance Transfer on Economic Growth of 9 cities in East Java Province from 2010-2019.*

Metode: *The data used secondary data which collected from Statistic Indonesia (BPS) of East Java Province. The method of collecting samples in this study using purposive sampling technique. The method used in this study is multiple linear regression analysis.*

Hasil: *The result of this research showed that both Local Revenue and Fiscal Balance Transfer simultaneously influenced on Economic Growth.*

Originalitas: *Partially, the Local Revenue has negative and significant effects on Economic Growth. For the last result, the Fiscal Balance Transfer has positive and significant effects on Economic Growth.*

Keywords: *Local Revenue, Fiscal Balance Transfer, Economic Growth*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja dari pembangunan ekonomi penting untuk melakukan evaluasi pada keberhasilan pembangunan. lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan dasar perencanaan serta pengambilan keputusan bagi pemerintah suatu daerah untuk masa yang akan datang. Prioritas utama pemerintah daerah adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.

Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri. Agar tujuan itu dapat terealisasi maka diperlukan peningkatan ekonomi dan juga pemerataan distribusi pendapatan. Suatu daerah memiliki kendala dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh kebijakan pemerintah serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi seperti belanja modal, dana perimbangan, serta pendapatan asli daerah (PAD). Langkah awal penting yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah adalah dengan melakukan strategi penataan pada keuangan daerah dan anggaran daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah tiap – tiap daerah atau kota secara mandiri mampu menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan baik yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, hal ini dimaksudkan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi lebih baik. Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2010-2019.

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2019
(Dalam Persen)

PROVINSI	DKI JAKARTA	JAWA BARAT	JAWA TENGAH	DIY	JAWA TIMUR	BANTEN
2010	6,51	6,09	5,8	4,87	6,68	5,94
2011	6,73	6,5	5,3	5,21	6,44	7,03
2012	6,53	6,5	5,34	5,37	6,64	6,83
2013	6,07	6,33	5,11	5,47	6,08	6,67
2014	5,91	5,09	5,27	5,17	5,86	5,51
2015	5,91	5,05	5,47	4,95	5,44	5,45
2016	5,87	5,66	5,25	5,05	5,57	5,28
2017	6,2	5,33	5,26	5,26	5,46	5,75
2018	6,11	5,65	5,3	6,2	5,47	5,77
2019	5,82	5,02	5,36	5,36	5,36	5,36
Rata-rata	6,166	5,722	5,346	5,291	5,9	5,959

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur menduduki posisi ketiga untuk pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta dan Banten. Berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Timur seperti perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata adalah modal yang kuat untuk digunakan demi kemakmuran masyarakatnya. Namun seperti halnya yang terjadi juga di seluruh Provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari masalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pendapatan.

Ketimpangan yang terjadi antar wilayah merupakan salah satu aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Begitu pula yang terjadi di Propinsi Jawa Timur, masalah yang menahun terjadi antara lain ketimpangan dan pemerataan ekonomi, yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki manfaat dalam pemecahan masalah kemiskinan yang terjadi di 9 kota di Propinsi Jawa Timur. Penyebab ketimpangan antar daerah antara lain: kegiatan ekonomi wilayah, alokasi yang digunakan untuk investasi, rendahnya tingkat mobilitas antar daerah, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, kondisi geografis suatu daerah, dan tersendatnya perdagangan antar daerah (Tambunan, 2003).

Tabel 2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun dasar 2010
Menurut kota di Jawa Timur tahun 2010-2019 (Dalam Persen)

Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Kediri	3,82	4,29	5,27	3,52	5,85	5,36	5,54	5,14	5,43	4,91	
Blitar	6,32	6,43	6,52	6,5	5,88	5,68	5,76	5,78	5,82	6,07	
Malang	6,25	6,04	6,26	6,2	5,8	5,61	5,61	5,69	5,72	5,9	
Probolinggo	6,12	5,95	6,49	6,47	5,93	5,86	5,88	5,88	5,93	6,05	
Pasuruan	5,66	6,28	6,31	6,51	5,7	5,53	5,46	5,47	5,54	5,82	
Mojokerto	6,09	5,97	6,09	6,2	5,83	5,74	5,77	5,65	5,8	5,9	
Madiun	6,93	6,79	6,83	7,65	6,62	6,15	5,9	5,93	5,96	6,52	

Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	Rata-rata
Surabaya	7,01	7,13	7,35	7,58	6,96	5,97	6	6,13	6,19	6,7
Batu	7,52	7,13	7,26	7,29	6,9	6,69	6,61	6,56	6,5	6,94
Jawa Timur	6,68	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	5,57	5,46	5,47	5,93

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 hingga 2019 menunjukkan tren kenaikan yang berfluktuatif. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) setiap Kota diperoleh dari sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan sebagainya. Rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB tertinggi terdapat pada Kota Batu sebesar 6,94 persen, dan diikuti oleh Kota Surabaya yang menduduki peringkat kedua sebesar 6,70 persen. Kemudian peringkat ketiga yaitu Kota Madiun dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,52 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah terdapat pada Kota Kediri sebesar 4,91 persen.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber finansial sendiri. Pemberian sumber-sumber penerimaan daerah sesuai potensi yang dimiliki merupakan salah satu pelaksanaan otonomi daerah dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur melalui pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah mencerminkan *local taxing power* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas (Kuncoro, 2004).

Kebijakan desentralisasi fiskal berdampak pada daerah, dimana daerah tersebut memiliki kewenangan lebih baik untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya sehingga porsi pendapatan asli daerah sebagai komponen penerimaan pemerintah juga meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah yang dianggap sebagai modal diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan eksternalitas positif. Berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah. Tetapi menurut Kuncoro (2004) dalam realisasinya, pendapatan asli daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah maksimal sebesar 20%. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan untuk masing-masing daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Infrastruktur serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perekonomian dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan aset tetap didana dari pengalokasian anggaran belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Putu, 2014).

Beberapa hasil penelitian yang menjadi landasan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain : Manek dan Badrudin (2015), Pattawe dkk. (2017), dan Firmansyah dan Nasir (2019) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Mukhtar (2015) dan Paat dkk. (2017) dimana PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar (2015) dan Angelina (2019) mengungkapkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Lebih lanjut, Manek dan Badrudin (2015) dan Paat dkk. (2017) pada penelitiannya menjelaskan bahwa Dana Perimbangan tidak mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan uraian dan penjelasan beberapa peneliti terdahulu di atas, maka riset skripsi ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota dalam wilayah Jawa Timur. Hal ini penting karena pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diterima akan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah atau kota tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (1994: 40), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian dengan menggunakan bahasa berbeda oleh para ahli, namun maksudnya tetap sama.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kuznets (dalam Jhingan, 2000: 57), adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dalam konsep dasar ekonomi makro, indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik Bruto adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2006: 19). Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang

menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada (Saggaf, 1999: 15).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu. PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengeahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (BPS, 2007:2).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, memerlukan perencanaan yang matang agar tujuannya untuk memberi pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dapat tercapai. Anggaran daerah merupakan salah satu dari beberapa hal untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan tujuan yang luas. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dapat dilakukan pada tahun berjalan untuk tahun selanjutnya. Sehingga dalam perencanaannya dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya dikatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. APBD harus memuat sasaran yang diharapkan sesuai menurut fungsi belanja, standar pelayanan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, serta kejelasan penggunaan bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Secara umum pengertian dari Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar membiayai pembangunan dan untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat. Namun perlu diingat bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor.

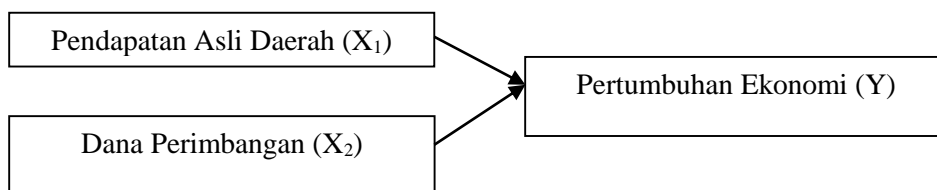
Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Menurut Elmi (2002), secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah: 1) Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian "kue nasional", baik vertikal maupun horizontal, dan 2) Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan kegunaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta beberapa penelitian terdahulu pada bagian sebelumnya, maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Fungsi dari pendapatan asli daerah itu sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya dengan berbagai usaha pemerintah daerah sebagai bentuk otonomi daerah yakni salah satunya melakukan pengeluaran untuk menjembatani produktivitas masyarakat daerah. Pendanaan pengoperasian pemerintahan melalui dana perimbangan diharapkan menambah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Hipotesis penelitian skripsi ini adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota-kota di Jawa Timur.
2. Dana Perimbangan diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota-kota di Jawa Timur.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan diduga secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota – Kota di Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah yang diprosikan dengan realisasi pendapatan asli daerah (X₁), Dana Perimbangan yang diprosikan dengan realisasi dana perimbangan (X₂), dan Pertumbuhan Ekonomi (Y)

yang diproksikan dengan realisasi PDRB berdasarkan harga konstan, yang diungkapkan di dalam laporan realisasi APBD Kota Provinsi Jawa Timur. Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi dengan menggunakan Laporan Realisasi APBD Kota Provinsi Jawa Timur.

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu variabel independen yang meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur pada rentang waktu 2010 – 2019. Untuk penentuan sampel penelitian, peneliti menggunakan *purposive sampling*.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, bandingan, volume yang berupa angka-angka yang dilihat dari Laporan Realisasi APBD Kota Provinsi Jawa Timur yang dipublikasikan melalui website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Data kuantitatif yang digunakan berupa data panel yaitu gabungan antara *data time series* dan *data cross section* 9 Kota yang ada di wilayah Propinsi Jawa Timur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut ditampilkan tabel hasil analisis regresi linier berganda yang menggunakan program IBM SPSS Versi 25.0:

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	-7,60E-13	-5.066	0.000
Dana Perimbangan (X ₂)	2,77E-12	6.139	0.000
Multiple R = 0.694	R ² = 0.481		
Konstanta : 5.772	Sig = 0.000		
Adjusted R Square = 0.459	F hitung = 21.336		

Sumber: Lampiran

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3 di atas, maka dapat dibuat model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 5.772 - 0.00000000000000007595X_1 + 0.00000000000000002771X_2$$

Interprestasi dari model regresi diatas adalah sebagai berikut :

1. β_0 = Nilai konstanta sebesar 5.772 menunjukkan bahwa apabila faktor Pendapatan Asli Daerah (X₁) dan Dana Perimbangan (X₂) adalah konstan atau nol, maka besarnya nilai Pertumbuhan Ekonomi (Y) naik sebesar 5.772.

2. $\beta_1 = - 0.0000000000000007595$ menunjukkan bahwa faktor Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh negatif, dapat diartikan apabila setiap ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (X_1) satu Rupiah maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan mengalami penurunan sebesar $- 0.0000000000000007595\%$ dengan asumsi X_2 Konstan.
3. $\beta_2 = 0.0000000000000002771$ menunjukkan bahwa faktor Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh positif, dapat diartikan apabila setiap ada kenaikan Dana Perimbangan (X_2) satu Rupiah maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.0000000000000002771% dengan asumsi X_1 Konstan.

Uji Hipotesis

Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau uji koefisien regresi secara simultan, digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi) (Duwi, 2013). Uji F dengan melihat analisis varian (ANOVA) sebagai berikut:

Tabel 4
Analisis Varian (ANOVA)

Sumber Varian	Jumlah Kuadrat	Df	Kuadrat Tengah	Sig.
Regresi	1,714	2	0,857	
Residual	1,848	46	0,04	0.000
Total	3,561	48		

Sumber: Lampiran

Berdasarkan tabel 4, nilai tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 5 % (sig < 5%), maka model regresi linier berganda yang digunakan adalah signifikan atau Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh secara serentak terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial tiap - tiap variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi apakah pengaruh signifikan atau tidak, berikut hasil dari uji t:

Tabel 5
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Beta	Coefficient Std. Error	Standardized Coefficient Beta	t	Sig.
1 Constant	5,772	0,029		197,25	0
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	-7,60E-16	0	-1,639	5,066	0
Dana Perimbangan (X_2)	2,77E-15	0	1,986	6,139	0

Sumber: Lampiran

Hasil uji t pada Tabel 5 di atas menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil uji t dengan taraf signifikan α (5%) menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y), karena nilai tingkat signifikansi t untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) adalah sebesar 0.000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) 0.05. Oleh karena itu, hipotesis pertama menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi diterima.

Hasil uji t tersebut juga menyatakan bahwa variabel Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil uji t dengan taraf signifikan α (5%) menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan (X_2) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y), karena nilai tingkat signifikansi t untuk variabel Dana Perimbangan (X_2) adalah sebesar 0.000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) 0.05. Oleh karena itu, hipotesis kedua menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial terbukti berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, terlihat dari nilai signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) 0.05 dan berpengaruh secara negatif sebesar -0.0000000000000007595. Dengan kata lain Ketika Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan.

Hal ini di dukung oleh penelitian terdahulu dari Pattawe, dkk (2017) dan Angelina (2019), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan penelitian ini tidak didukung oleh penelitian terdahulu dari Paat, dkk (2017), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kesimpulannya adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti 9 Kota yang ada di wilayah Jawa Timur belum mampu menggali sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Sehingga, Pendapatan Asli Daerah 9 Kota tersebut disarankan harus mampu menggali potensi sumber-sumber selain dari Pendapatan Asli Daerah dengan mengalihkan belanja daerah ke Pertumbuhan Ekonomi.

Upaya yang harus dilakukan 9 Pemerintah Kota di Propinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu (1) intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintensifkan dalam arti operasional pemungutannya, (2) pengawasan (untuk melihat kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan Wajib Pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak. Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak, (3) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma

yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan redistribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat (Rulan, 2020).

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Dana Perimbangan secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, terlihat dari nilai signifikan Dana Perimbangan sebesar 0.000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) 0.05, terbukti. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu dari Mukhtar (2015) dan Angelina (2019), yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu dari Paat, dkk (2017), yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, artinya Dana Perimbangan secara nyata telah berdampak baik dan mampu memicu Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Kemudian Pemerintah Jawa Timur telah mampu mengalokasikan Dana Perimbangan tersebut dengan baik sehingga mampu memicu Pertumbuhan Ekonomi daerah Jawa Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Variabel – variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) secara bersama berpengaruh nyata terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hal tersebut menunjukkan bahwa semua hipotesis tentang dugaan adanya pengaruh bersama dari variabel – variabel bebas (X) tersebut terhadap variabel dependen (Y) diterima.

Pendapatan Asli Daerah (X_1) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hal ini berarti 9 Kota yang ada di wilayah Jawa Timur belum mampu menggali sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Sehingga, Pendapatan Asli Daerah 9 Kota tersebut disarankan harus mampu menggali potensi sumber-sumber selain dari Pendapatan Asli Daerah dengan mengalihkan belanja daerah ke Pertumbuhan Ekonomi.

Dana Perimbangan (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Dana Perimbangan secara nyata telah berdampak baik dan mampu memicu Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Kemudian Pemerintah Jawa Timur telah mampu mengalokasikan Dana Perimbangan tersebut dengan baik sehingga mampu memicu Pertumbuhan Ekonomi daerah Jawa Timur.

REFERENSI

Angelina, A. 2019. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Wilayah Malang Raya Tahun 2003-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 7, No. 2.

- Arsyad, L. 2007. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Elmi, B. 2002. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya Dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Ferdinand, A. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Edisi kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Firmansyah, D., dan M. Nasih. 2019. The influence of local revenue, balancing funds and private investment on economic growth and welfare of communities in east java province. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*. Vol. 11, No.5 (Special Issue). h.1241-1251.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ke 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jhingan. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan D Guritno. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Sulfadli. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. *Jurnal Kritis*. Vol. 3, No. 1. h. 5.
- Manek, M dan R. Badrudin. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*. Vol. 17, No. 2, h. 81-98.
- Mankiw, N.G. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Mukhtar, A. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar Tahun 2003-2012. *Economix*. Vol. 3, No. 1. h.70-81.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Paat, D.C., R.A.M. Koleangan, dan V. A. Rumat. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 18, No. 4.
- Pattawe, A., D. Nuridin, N. Haris, dan M. I. Bakri. 2017. The Effect of Local Revenue and Matching Grant on Capital Expenditures and Implications on Economic Growth in Indonesia. *International Journal of Business and Management Invention*. Vol. 6, No. 6 (Special Issue). h.12-17.
- Rahardja, A. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahardja, P dan Manurung, M. 2001. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Saggaf, S. 1999. “Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kotamadya Dati II Pekanbaru”. *Tesis*. Program Pascasarjana USU Medan.
- Samuelson, P. A., dan N. William. 2004. *Ilmu Mikroekonomi*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Santoso, S. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sukirno, S. 1994. *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan*. cetakan ketiga. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Tambunan, T. 2001. *Transformasi Ekonomi Indonesia*. Edisi 1. Jakarta: Salemba.
- Todaro, M. P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Juli 2012: Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota 2010-2011*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2012/07/16/08e1722d9d175f631ad8abb2/statistik-keuangan-pemerintahan-kabupaten-kota-2010-2011.html> pada 16 Januari 2022, Jam 16.20 WIB.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Mei 2013: Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota 2011-2012*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2013/05/01/dc7ec59de2be1ff40fa1b0ec/statistik-keuangan-pemerintahan-kabupaten-kota-2011-2012.html> pada 16 Januari 2022, Jam 16.23 WIB.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Mei 2014: Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota 2012-2013*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2014/05/30/741b455795e6b463829b8632/statistik-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-kota-2012-2013.html> pada 16 Januari 2022, Jam 16.26 WIB.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *April 2015: Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota 2013-2014*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2015/04/17/ee6f3525b9ba8ece29502272/statistik-keuangan-pemerintahan-kabupaten-kota-tahun-2013---2014.html> pada 16 Januari 2022, Jam 16.29 WIB.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *April 2016: Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota 2014-2015*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2016/04/15/c99050fe64a28ec026833abe/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2014-2015.html> pada 16 Januari 2022, Jam 16.32 WIB.

- Badan Pusat Statistik. (2017). *April 2017: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2015-2016 Buku 1 (Sumatera, Jawa)*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2017/04/13/bdc92c845c2c2c198da7c36d/s-tatistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2015-2016-buku-1--sumatera-jawa-.html> pada 16 Januari 2022, Jam 16.35 WIB.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *April 2018: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2016-2017 Buku 1 (Sumatera, Jawa)*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2018/04/19/5ec501731f50b8899346d0ca/s-tatistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2016-2017-buku-1--sumatera-jawa-.html> pada 16 Januari 2022, Jam 16.38 WIB.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *April 2019: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2017-2018 Buku 1 (Sumatera, Jawa)*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2019/04/18/5ef9f0e0c5aa441338c9a069/st-atistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2017-2018-buku-1--sumatera-jawa-.html> pada 16 Januari 2022, Jam 16.41 WIB.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *April 2020: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2018-2019 Buku 1 (Sumatera, Jawa)*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2012/07/16/08e1722d9d175f631ad8abb2/s-tatistik-keuangan-pemerintahan-kabupaten-kota-2010-2011.html> pada 16 Januari 2022, Jam 16.44 WIB.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *April 2021: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2019-2020 Buku 1 (Sumatera, Jawa)*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/04/08/8e4cd390e702366ad3cc6f92/st-atistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2019-2020-buku-1--sumatera-jawa-.html> pada 16 Januari 2022, Jam 16.44 WIB